

# **PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN GAYO LUES TERHADAP PEMANFAATAN KAWASAN PENYANGGA (BUFFER ZONE) TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER**

Meilinda Suriani Harefa<sup>1</sup> dan Gunmas<sup>2</sup>

## ***Abstrak***

*The aim of this research is to know the understanding of society about the benefition of buffer zone arround in Gunung Leuser National Park (GLNP), to know the effort which are done by around of society as living earning and to know the participation of society to manage the buffer zone and also to see the relationship of socio economic to the participation of society. The research is done by set of questioners and field observation.*

*Society data is obtained at 4 regional districts of research in Sub-Province Gayo Lues to understand that their settlement reside at conservation frontier area and reside at GLNP buffer zone. Most of people work as a farmer and carry out the cultivation of plant in benefit the land as the first of their living earning to fulfill their life needed. The participation of society at Sub-Province Gayo Lues based on the result of calculation of quisioners of expressed which have high percentage avarege. From calculation analyse correlation at 4 districts (Blangkejeren Distric, Kuta Panjang Distric, Blang Pegayon Distric and Puteri Betung Distric) represented Sub-Province Gayo Lues, it was obtained by the result that avarege didn't have signifiican relationship between socio economic variable to participation of society.*

*Keywords : Participation society, Gunung Leuser National Park, Sub-Province Gayo Lues, buffer zone*

## **PENDAHULUAN**

Pada akhir tahun 1970-an Indonesia mulai mengikuti negara-negara lain dengan mengambil langkah untuk mengembangkan perlindungan dan pelestarian alam dalam bentuk yang relatif baru,

---

<sup>1</sup>Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan

<sup>2</sup>Staf Yayasan Gajah Sumatera

yaitu bentuk Taman Nasional, pada saat itu hal-hal yang diikuti adalah prinsip-prinsip dasar dari Taman Nasional pertama di dunia, Taman Nasional (TN) Yellowstone di AS, dan prinsip-prinsip pokok yang sudah diterima di Persidangan Umum IUCN (The World Conservation Union) pada tahun 1969 (Soewardi, 1978).

Seiring berkembangnya zaman, pengelolaan Taman Nasional mengalami pembenahan. Banyak Taman Nasional seluruh dunia yang sudah melaksanakan cara pengelolaan yang lebih melibatkan masyarakat karena adanya kesadaran akan manfaatnya. Keterlibatan masyarakat membantu pihak konservasi dengan menaikkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kawasan konservasi, menggunakan pengetahuan masyarakat yang mendalam tentang lingkungan alam dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumberdaya alam di kawasan konservasi dengan menaikkan tingkat ekonominya. Kenaikan ekonomi itu tentu saja membantu masyarakat setempat.

Keberadaan Taman Nasional merupakan salah satu upaya manusia yang penting dalam menciptakan dan menetapkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan lingkungan alam. Di Indonesia, Taman Nasional memiliki kepentingan yang sama. Bahkan hal itu sangat terlihat di negara ini, yang sekarang memiliki lima puluh Taman Nasional.

Menurut Soemarwoto (1994) didalam lingkungan harus terdapat sumberdaya yang mendukung kehidupan jumlah manusia yang bertambah sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Jumlah penduduk dan keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa terjalin interaksi antara manusia dan lingkungan. Pada tingkat nasional, ketergantungan masyarakat sekitar kawasan hutan naik seiring dengan krisis ekonomi selama kurun waktu sembilan tahun terakhir. Akibatnya banyak kawasan, termasuk Taman Nasional dimanfaatkan secara lebih intens lagi.

Data statistik penduduk pada tahun 2005 Kabupaten Gayo Lues berpenduduk 73.003 jiwa mencakup 57 persen dari wilayah lama Aceh Tenggara dan dibagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Selanjutnya Gayo Lues dalam angka (2006) menyatakan dari segi potensi wilayah, Gayo Lues cukup luas yakni mencapai sekitar 571.967 hektar atau sekitar 57,48 persen dari luas Aceh Tenggara sebelum dimekarkan. Kondisi alam Gayo Lues penuh tantangan dan sangat dilematis. Dari total luas wilayah Gayo Lues 571.967 hektar, sekitar 441.935 hektar atau 77,27 % merupakan kawasan lindung (Gayo Lues dalam angka, 2006). Kenyataan itu memang tidak bisa

diingkari karena di sekitar daerah Gayo Lues terbentang paru-paru dunia bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Untuk mengatasi masalah tekanan dari luar terhadap Taman Nasional, terutama tekanan penduduk untuk mendapatkan lahan pertanian, kayu bakar dan keperluan lain maka dikembangkan konsep kawasan penyangga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kawasan Penyangga*

Masyarakat diwilayah penelitian memahami keberadaan TNGL berada disekitar kawasan pemukiman tempat tinggalnya. Pada umumnya masyarakat setempat telah hidup sejak sebelum daerah disekitar wilayah penelitian ditetapkan

sebagai kawasan taman nasional dan merupakan kawasan konservasi.

Berdasarkan hasil perhitungan kuisisioner dijumpai 84.96 % responden sering mendengar Taman Nasional Gunung Leuser sehingga masyarakat dinyatakan memahami bahwa diwilayah sekitar tempat tinggalnya terdapat kawasan TNGL sebagai kawasan konservasi sehingga dapat mempengaruhi partisipasi yang dilakukan masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan penyangga.

Keberadaan Taman Nasional sangat besar sekali manfaatnya kepada masyarakat desa yang berada disekitar kawasan. Manfaat dari Taman Nasional Gunung Leuser dapat menyebabkan masyarakat tidak lepas dari pemahaman terhadap TNGL. Sejalan dengan pendapat Subaktini (2006) Pemahaman terhadap keberadaan TNGL disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengambil hasil hutan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Pemahaman masyarakat terhadap keberadaan TNGL juga tidak terlepas dari lebih luasnya lahan yang diperuntukkan sebagai hutan konservasi dibandingkan dengan luas lahan untuk beraktifitas sehingga kebutuhan hidupnya disesuaikan dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Subaktini (2006) yang menyatakan masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan banyak menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan sehingga peruntukkan lahan hutan tersebut akan lebih banyak diketahui masyarakat yang berada disekitarnya.

Pemahaman masyarakat terhadap batas dari Taman Nasional dengan adanya beberapa patok yang ditancapkan pada tanah didaerah tempat tinggal responden dijadikan sebagai sarana untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak merusak Taman Nasional Gunung Leuser yang berada disekitar kawasan tempat tinggalnya. Dari

hasil perolehan data sebanyak 77.57 % responden memahami tapal batas TNGL. Pemahaman ini disebabkan responden sebagai penduduk di wilayah tersebut lebih dominan sudah sejak lama menetap ataupun sejak lahir berada pada wilayah penelitian sehingga lebih memahami keberadaan dan kondisi wilayah tempat tinggalnya.

Pengetahuan tapal batas TNGL didasari oleh lama menetap penduduk pada wilayah tempat tinggal dan merupakan masyarakat lokal yang sangat mengetahui bagaimana yang telah berlaku di wilayahnya, hal ini sejalan dengan pendapat Nababan (2003) bahwa masyarakat lokal dimaksud adalah kumpulan komunitas yang hidup pada suatu kawasan secara turun menurun dan memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alamnya untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya Manulang (1999) mempertegas bahwa masyarakat pada umumnya telah hidup dan menetap sejak sebelum suatu daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi sehingga mereka lebih memahami batas kawasan yang diperuntukkan untuk kawasan konservasi tersebut.

Pemahaman terhadap kawasan penyangga di Kabupaten Gayo Lues sebanyak 75.73 % responden mengetahui tentang kawasan penyangga. Pemahaman mengenai daerah ini haruslah diketahui oleh masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar hutan dan kawasan taman nasional. disebabkan salah satu ancaman terhadap kawasan konservasi berasal dari masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Seperti yang ditegaskan oleh Manulang (1999) bahwa masyarakat yang hidup disekitar kawasan konservasi biasanya memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti bahan makanan, pakaian dan bahan bangunan dari dalam kawasan. Selain itu masyarakat tersebut juga berkebun dan bahkan bermukim dalam kawasan konservasi.

Responden yang memahami kawasan penyangga juga yang menyadari bahwa tempat tinggalnya berada disekitar kawasan penyangga. responden yang sangat mengetahui dan menyadari bahwa tempat tinggalnya berada pada kawasan penyangga sebanyak 79.95 %. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menyadari keberadaan pemukiman mereka berada di kawasan penyangga maka responden memahami kawasan penyangga memberikan pengaruh yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya.

Pemahaman responden terhadap kawasan penyangga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memanfaatkan kawasan penyangga sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Dimana semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap kawasan penyangga maka aktifitas yang dilakukan masyarakat dapat lebih partisipatif dalam mengelola lingkungannya dan memanfaatkan kawasan penyangga

untuk mempertahankan sumberdaya alam yang berada disekitarnya. Sejalan dengan pendapat Subaktini (2006) bahwa hubungan saling ketergantungan manusia dan hutan dalam suatu sistem interaksi kehidupan sudah berlangsung sejak lama sehingga masyarakat lebih memahami keberadaan kawasan penyangga sebagai sumber kehidupan manusia dan sebagai sarana perlindungan Taman Nasional. Masyarakat sekitar hutan dominan melakukan aktifitasnya dengan bergantung kepada sumber daya alam yang berada disekitar tempat tinggal. Masyarakat memanfaatkan sumberdaya hutan karena dapat merasakan langsung dampak penggunaannya.

Pemahaman terhadap manfaat kawasan penyangga sebagai benteng pertahanan kawasan konservasi sebanyak 75.99 %. Perolehan data ini mengasumsikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap manfaat kawasan penyangga telah dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Pemahaman terhadap pemanfaatan juga mempengaruhi bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yang menerima dampak langsung dari partisipasi tersebut. Pemahaman manfaat kawasan penyangga oleh masyarakat sejalan dengan pendapat Adhiprasetyo (2006) bahwa secara tidak langsung masyarakat sekitar hutan banyak melakukan langkah-langkah penyelamatan hutan dari kerusakan yang disebabkan proses alam maupun kerusakan yang disebabkan oleh manusia.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pemahaman responden terhadap kawasan penyangga TNGL, diperoleh data sebesar 78.84 % memahami kawasan penyangga TNGL tersebut. Hal ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman responden tinggi.

#### *Usaha yang Dilakukan Masyarakat*

Masyarakat yang bergantung pada sumberdaya kawasan penyangga sebesar 78.63 %. Hal ini membuktikan keberadaan daerah penyangga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut merupakan kebutuhan hidup yang primer dan diperoleh dari hasil hutan. Hasil dari wawancara langsung dengan masyarakat, keberadaan kawasan penyangga yang berada disekitar tempat tinggal penduduk menyebabkan perhatian penduduk untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya lahan tersebut sangat besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Subaktini (2006) yang menyatakan bahwa sebagian besar penduduk yang tinggal di kawasan penyangga kawasan taman nasional memanfaatkan wilayah tersebut sebagai sumber mata pencaharian bahkan menjadikannya sebagai pekerjaan pokok untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang melakukan kegiatan mencari kayu untuk keperluan rumah tangga dan memetik hasil hutan memperoleh jumlah 75.46 % dibandingkan kegiatan lainnya. Hasil perolehan data ini mengisyaratkan bahwa responden lebih banyak memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengambil kayu atau hasil hutan yang dilakukan secara tradisional. Hasil ini sejalan dengan pendapat Bismark dan Reny (2006) yang menyatakan salah manfaat kawasan penyangga bagi masyarakat sekitar hutan adalah sumber kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari informasi BPS (2006) terkait dengan struktur dan pembangunan ekonomi, kabupaten Gayo Lues yang terhitung sebagai Kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara memiliki perekonomian yang terdiversifikasi dalam beberapa sektor, dimana sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan yang cukup penting dalam produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pemanfaatan kawasan penyangga untuk meningkatkan taraf perekonomian sebesar 78.89 %. Hasil ini berhubungan dengan usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan penyangga dominan untuk lahan pertanian, dimana mata pencaharian utama responden lebih banyak didominasi sebagai petani atau usaha berkebun (66.23 %). Pemanfaatan kawasan penyangga sebagai lahan pertanian oleh karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Gayo Lues disebabkan sebagian besar penduduknya sangat bergantung pada sektor tersebut. Hal ini didukung oleh kondisi daerah yang subur dengan sumber daya air yang melimpah yang memiliki peluang untuk dikembangkan dimasa akan datang.

Ditinjau dari potensi areal pertanian yang dapat dikembangkan, dari data BPS (2207) diperoleh data dari 571.967 ha luas Kabupaten Gayo lues, 130. 032 ha (22.73 %) merupakan luas pertanian yang tersedia. Luas lahan yang sudah terpakai sebanyak 14.408 ha (2.52 %) sedangkan luas Ipotensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan sebanyak 115.624 ha (20.22 %).

Kecamatan Balangkejeren sangat strategis, berlokasi ditengah jalur Ladia Galaska sehingga diincar pedagang-pedagang partai besar dari Medan. Para pedagang ini bermaksud mendirikan gudang tempat penyimpanan di Kecamatan paling padat ini. Kondisi ini menyebabkan beberapa bangunan kosong telah berdiri diberbagai sudut wilayah yang drencanakan sebagai areal jual beli dagangan. Dengan demikian disinyalir penjualan hasil-hasil alam dari kabupaten Gayo Lues lebih banyak terarah ke Sumatera Utara terutama ke

Ibukotanya Medan dibandingkan ke Banda Aceh disebabkan Medan sebagai ibu kota propinsi terdekat dari Kabupaten Gayo Lues dibandingkan Banda Aceh.

Kecamatan Puteri Betung merupakan satu-satunya kecamatan yang seluruh wilayahnya berada pada kawasan TNGL yang merupakan kawasan hutan TNGL yang diperuntukkan untuk pemukiman (enclave). Oleh karena itu, sangat sulit bagi masyarakat di kecamatan ini untuk membuka lapangan kerja baru di wilayah tersebut. Andalan utama mata pencaharian dengan memanfaatkan daerahnya ini terbatas pada pemanfaatan hasil hutan disamping pekerjaan lainnya sehingga kebutuhan hasil hutan terus meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya kebutuhan hidup. Usaha yang dilakukan masyarakat Kecamatan Puteri Betung dominan mengolah hutan menjadi lahan pertanian ataupun ladang tradisional untuk memenuhi kebutuhannya.

Hasil pertanian dan peternakan didagangkan pada wilayah Kecamatan tersebut maupun diluar kecamatan. Usaha yang dilakukan masyarakat di wilayah ini dibatasi oleh sumberdaya alam yang terdapat pada Kecamatan tersebut.

Berdasarkan informasi langsung dari masyarakat pada 4 kecamatan wilayah penelitian, saat ini pemanfaatan hutan disekitar pemukiman penduduk yang merupakan kawasan penyangga TNGL tidak saja dimanfaatkan oleh penduduk yang bermukim di wilayah tersebut. Permasalahan yang muncul saat ini banyak pendatang yang menerobos masuk ke wilayah ini untuk mengeruk hasil hutan atau membuka kebun oleh alasan perekonomian. Tidak jarang pendatang yang menerobos masuk ke wilayah tersebut mengambil hasil hutan dalam partai besar seperti kayu-kayuan dengan menggunakan peralatan yang canggih dan hasil hutan yang diambil memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Permasalahan ini dipertegas oleh Manulang (1999) bahwa pelaku perusak hutan lebih banyak dilakukan para pendatang yang sengaja datang untuk kepentingan pribadi dan banyak kasus yang terjadi, dimana perambah hutan adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik modal dikota untuk membuka kebun-kebun dan kawasan baru.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata usaha yang dilakukan responden dalam pemanfaatan kawasan penyangga TNGL sebesar 77.66 %. Hal ini menyatakan bahwa tingkat usaha responden tinggi. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2006) bahwa tingkat persentase antara 60 % sampai dengan 80 % dinyatakan tinggi.

### *Partisipasi Masyarakat*

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan penyangga tidak semua memiliki pengaruh dengan jumlah yang seragam atau sama. Partisipasi masyarakat mengelola hutan diperkuat dengan pendapat Adhiprastyo (2006) yang menyatakan bahwa langkah bijaksana untuk mengelola hutan melalui partisipasi masyarakat dengan adanya kerjasama bersama masyarakat sekitar hutan dan melakukan aktifitas pengawasan pelestarian fungsi hutan dan konsep pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bisa diselamatkan melalui pengelolaan hutan secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat serta diciptakannya keamanan yang terjamin demi kelangsungan hidup masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kawasan TNGL yang berada disekitar pemukiman sudah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian atau perladangan berpindah dengan sistem pembukaan lahan yang luas, sehingga dengan terjadinya pembukaan lahan ini dapat menyebabkan terjadinya erosi dan tanah longsor bila hujan lebat turun.

Partisipasi yang dilakukan masyarakat pada Kabupaten Gayo Lues sebesar 85.75 %. Tanggapan terhadap pelestarian hutan dan kawasan penyangga merupakan salah satu bentuk daripada partisipasi ide atau tanggapan masyarakat, sejalan dengan pendapat Awang (1999) partisipasi ide atau tanggapan merupakan bentuk keterlibatan yang mengarah pada perumusan, perancangan dan perencanaan kegiatan. Selanjutnya Awang (1999) menegaskan bahwa partisipasi ide atau tanggapan berada pada fase-fase awal. Hal ini juga dipertegas oleh Bismark dan Sawitri (2006) yang menyatakan bahwa pembangunan suatu wilayah dapat berjalan maksimal apabila terdapat penduduk yang produktif untuk lebih aktif melakukan aktifitas yang membangun.

Bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat disekitar tempat tinggal dominan dilakukan masyarakat dengan membuka lahan pertanian (86.28 %). Aktifitas ini didukung oleh letak wilayah berbatasan langsung dengan lahan hutan sehingga lebih mudah untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan pertanian. Hal ini didukung oleh Subaktini (2006) yang menyatakan bahwa masyarakat didalam dan sekitar hutan banyak menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan dan memiliki hubungan erat dengan hutan. Selanjutnya Subaktini (2006) menegaskan bahwa hubungan saling ketergantungan manusia dan hutan dalam suatu sistem interaksi kehidupan telah berlangsung lama.



Partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan pertanian merupakan suatu aktifitas yang tidak terlepas dari masyarakat hutan. Sesuai dengan pendapat Alikodra (1976) yang menyatakan perkembangan peradaban masyarakat hutan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam melalui pemanfaatan hutan dengan melakukan pembukaan lahan berpindah, menanam tumbuhan dan mengumpulkan bahan makanan dari tumbuhan serta membudidayakan komoditi pertanian dan ternak pada lahan yang dikuasainya.

Pekerjaan pertanian yang dilakukan masyarakat pada wilayah penelitian pada hasil survey langsung dapat dilihat bahwa masyarakat mengolah lahan dengan cara bertani secara tradisional dengan sistem pembukaan lahan hutan disekitar tempat tinggal. Hal ini tentu saja mempengaruhi keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser, oleh karena dengan munculnya kepala keluarga baru akan bertambah areal hutan yang dibuka sebagai lahan pertanian dan mengakibatkan semakin luasnya pembukaan lahan yang dibuka. Pembukaan lahan inipun sangat mudah dilakukan oleh karenan areal hutan yang berada disekitar pemukiman penduduk dan penduduk lebih mudah menjangkau lapangan kerja yang tidak membutuhkan operasional yang besar untuk memulai pekerjaannya.

Aktifitas yang dilakukan masyarakat pada dasarnya dilakukan atas kesukarelaan secara personal (88.39 %). Kesukarelaan merupakan bentuk dari partisipasi yang penting dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sejalan dengan pendapat Awang (1999) bahwa dalam pengambilan keputusan merupakan inisiatif dan kesukarelaan sendiri berdasarkan kearifan lokal yang terdapat pada daerah setempat untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai hambatan dan merupakan bentuk inovatif dalam melihat peluang atas pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Keterlibatan pemerintah dalam upaya pemeliharaan kawasan penyangga merupakan salah satu bentuk aksi untuk mempertahankan kelestarian kawasan penyangga Taman Nasional, hutan lindung serta ekosistemnya. Kegiatan inipun menjadi media pembelajaran masyarakat untuk mengelola hutan, masyarakat meniru apa yang diterapkan oleh pemerintah oleh karena pola pikir masyarakat sekitar kawasan cenderung rendah, sehingga hal yang lebih mudah dilakukan adalah meniru apa yang dilakukan oleh pihak lain. Manulang (1999) juga menegaskan bahwa masyarakat di sekitar hutan atau kawasan konservasi pada umumnya memiliki ciri-ciri berpendidikan rendah, sehingga pengaruh pihak lain lebih kuat daripada menganalisa dengan pemikiran.

Kinerja pemerintah menjadikan motivasi besar bagi masyarakat untuk partisipasi dalam pengelolaan kawasan penyangga. Dari data diperoleh masyarakat yang sering mendengar tentang kegiatan pemeliharaan kawasan penyangga oleh pemerintah sebanyak 82.32 %. Data ini menyatakan bahwa pemerintah memberikan pengaruh besar terhadap partisipasi yang dilakukan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Utomo (2000) pendekatan partisipasi yang dilakukan masyarakat sekitar hutan merupakan suatu syarat keberhasilan konservasi.

Kegiatan yang dilakukan pemerintah terhadap pemeliharaan kawasan penyangga dapat diketahui oleh masyarakat oleh karena adanya aksi atau bentuk nyata kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang sering dilakukan pemerintah pada daerah penelitian ini adalah seperti kegiatan sosialisasi undang-undang kehutanan dan konservasi baik itu dalam bentuk kepres, kepmen maupun perda serta kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan pengawasan hutan kepada masyarakat.

Masyarakat sangat berharap pengelolaan kawasan penyangga TNGL dapat menjadi lebih baik (85.22 %). Harapan ini dinyatakan oleh masyarakat karena ketergantungan masyarakat kepada hutan disekitarnya sangat besar. Hasil hutan menjadai sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitar baik untuk diperjual belikan maupun dikonsumsi sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Primack (1993) bahwa sumberdaya hayati yang diperoleh masyarakat dari hutan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu : (a) produktif, yaitu yang diperjual belikan dipasar, dan (b) konsumtif, yaitu yang dikonsumsi sendiri atau tidak dijual. Harapan ini mendukung terhadap besarnya ketergantungan hidup masyarakat terhadap kawasan penyangga, dimana pemanfaatan kawasan penyangga oleh masyarakat sampai saat ini yaitu melakukan kegiatan pertanian, peternakan dan pengembangan perkebunan rakyat seperti karet, kopi, coklat, tembakau dan lain sebagainya.

Partisipasi masyarakat pada Kabupaten Gayo Lues terhadap kawasan penyangga juga ditunjukkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kelompok aktif (86.28 %) kegiatan sosial dan gotong royong (85.75 %) dan kegiatan pengamanan desa (88.92 %). Kegiatan ini dinyatakan oleh Awang (1999) bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas yang saling terkait untuk pemenuhan kebutuhan maupun sosial. Aktifitas masyarakat dalam wujud domestik dan publik serta kesadaran yang tinggi terhadap peranan dan fungsi personal dalam menjaga kawasan penyangga merupakan faktor pendukung dalam pemanfaatan kawasan

penyangga yang menghadirkan partisipasi yang positif terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata partisipasi responden terhadap kawasan penyangga TNGL, diperoleh data sebesar 86.57 % partisipasi yang dilakukan responden pada kawasan penyangga TNGL tersebut. Hal ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat sangat tinggi. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Sarwono (2006) bahwa persentase 80 % sampai dengan 100 % pada tahapan persentase yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai responden merupakan suatu kebutuhan hidup. Sejalan dengan pendapat Awang (1999) bahwa partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan merupakan aktifitas yang saling terkait satu sama lainnya yang tidak terlepas untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun sosial.

#### *Hubungan Sosio Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat*

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Gayo Lues melalui perwakilan 4 kecamatan yang diteliti yaitu Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Kuta Panjang, Kecamatan Blang Pegayon dan Kecamatan Puteri Betung diperoleh hasil perhitungan korelasi antar sosio ekonomi terhadap partisipasi masyarakat tidak semuanya variabel yang menyatakan hubungan korelasi yang nyata (Tabel 1). Hubungan yang diperoleh dari korelasi tersebut didominasi hasil yang tidak nyata atau tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Tabel 1. Ringkasan hasil perhitungan korelasi antar sosio ekonomi terhadap partisipasi masyarakat

Variabel	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>7</sub>	Y <sub>8</sub>	Y <sub>9</sub>
X <sub>1</sub>	.007	-.022	.006	.066	-.046	-.010	-.034	.022	-.005
X <sub>2</sub>	-.044	-.017	-.018	.087	.074	.031	.011	.000	.057
X <sub>3</sub>	.005	.025	.029	.014	-.050	.029	.019	-.013	-.008
X <sub>4</sub>	-.004	-.062	-.010	-.057	.014	.108*	.061	.070	.084
X <sub>5</sub>	-.055	-.018	.016	.023	.034	-.073	.032	-.032	.100
X <sub>6</sub>	.045	.118*	.025	.103*	-.010	-.025	.046	.037	-.032
X <sub>7</sub>	-.092	.024	.050	-.046	-.028	-.040	-.036	-.001	.053

Keterangan : \*\* sangat nyata

\* nyata

Kenyataan yang diperoleh pada wilayah penelitian bahwa jumlah tanggungan (X<sub>4</sub>) memiliki hubungan yang nyata atau korelasi yang nyata dengan pertemuan kelompok (Y<sub>6</sub>). Kelompok tersebut terdiri dari responden dan keturunannya yang merupakan masih dalam tanggungan dalam keluarga. Jumlah tanggungan yang banyak dalam

keluarga memiliki persentase yang tinggi (66.75) dan tanggungan dalam keluarga inipun menjadi sumber pembentukan kelompok didalam desa, karena jumlah kepala keluarga yang ada di desa tidak banyak sedangkan jarak antara rumah yang satu dengan lainnya berjauhan. Sehingga pertemuan kelompokpun dihadiri oleh anggota keluarga.

Selanjutnya dari Tabel 1. Pekerjaan sampingan (X6) memiliki korelasi yang nyata dengan kegiatan masyarakat disekitar tempat tinggal (Y2). Masyarakat yang memiliki pekerjaan sampingan dan tidak diandalkan memiliki presentase tertinggi (34.56 %) atau secara keseluruhan masyarakat yang menyatakan memiliki pekerjaan sampingan baik yang tidak menentu, tidak bisa diandalkan dan bisa diandalkan sebanyak 70.97 %. Hal ini berhubungan dengan aktifitas yang dilakukan di sekitar tempat tinggal yang dominan melakukan pembukaan lahan untuk pertanian (86.28 %). Dipertegas juga oleh Awang (1999) bahwa partisipasi masyarakat disekitar hutan dirangsang oleh pemenuhan kebutuhan hidup melalui pemanfaatan sumberdaya hutan disekitar tempat tinggalnya yang dipermudah oleh berbagai saran dan prasarana.

Hubungan korelasi yang nyata juga dijumpai antara pekerjaan sampingan (X6) dan peranan pemerintah (Y4). Pekerjaan sampingan yang dilakukan masyarakat untuk menambah penghasilan, pekerjaan sampingan ini juga tidak luput dari peranan pemerintah dalam pemeliharaan kawasan penyangga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, dimana masyarakat sering mengetahui pemerintah melakukan kegiatan pemeliharaan kawasan penyangga sebanyak 82.32 %. Hal ini dipertegas oleh Lelenoh (1994) bahwa kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi salah satunya dipengaruhi oleh pekerjaan sedangkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat adalah peranan pemerintah yang mendukungnya.

Pada hasil perhitungan data responden, jumlah responden yang memiliki umur produktif sebanyak 49.34 % yang menyatakan bahwa usia produktif berimbang jumlahnya dengan usia non produktif, sehingga tidak dapat dilihat hubungan usia produktif dengan tidak produktif terhadap partisipasi yang dilakukan.

Umur produktif seharusnya sangat berperan penting pada proses pembangunan, hal ini juga dipertegas oleh Bismark dan Sawitri (2006) yang menyatakan bahwa pembangunan statu wilayah dapat berjalan maksimal apabila penduduk produktif lebih aktif melakukan aktifitas membangun. Namun, di Kabupaten Gayo Lues umur produktif tidak

menjadi suatu indikator besar kecilnya partisipasi masyarakat yang dilakukan.

Pada Kabupaten Gayo Lues diperoleh tingkat pendidikan yang rendah mendominasi daripada pendidikan yang tinggi dengan jumlah persentase 40.63 % masyarakat yang tidak sekolah sampai tamatan SD, sehingga dapat dinyatakan bahwa keberadaan masyarakat yang memiliki pendidikan rendah yang dominan akan menghasilkan pola pemikiran yang rendah dalam hal keterlibatan dan partisipasi yang dilakukan. Sejalan dengan pendapat Manulang (1999) yang menyatakan bahwa masyarakat di sekitar hutan atau kawasan konservasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berpendidikan rendah, tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, sistem pertanian yang sederhana dan belum mengembangkan perilaku petani produsen yang berorientasi ke pasar. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah, penguasaan ketrampilan dan teknologi yang rendah serta akses pasar yang minim pada umumnya mereka adalah masyarakat yang miskin sehingga tidak dapat menjadi suatu indikator memiliki hubungan yang kuat terhadap meningkatnya partisipasi yang dilakukan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

- a. Masyarakat sebagai responden di Kabupaten Gayo Lues yang diwakili 4 kecamatan wilayah penelitian memiliki pemahaman yang tinggi terhadap status wilayah bermukim sebagai kawasan penyangga kawasan TNGL. Hal ini dinyatakan dengan diperolehnya hasil perhitungan rata-rata persentase pemahaman masyarakat sebesar 78.84 %
- b. Berdasarkan perhitungan rata-rata persentase usaha masyarakat pada Kabupaten Gayo Lues yang diwakili oleh 4 kecamatan wilayah penelitian dalam memanfaatkan kawasan penyangga sebanyak 77.66 % yang menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan penyangga sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup dinyatakan tinggi.
- c. Partisipasi yang dilakukan masyarakat pada Kabupaten Gayo Lues dinyatakan sangat tinggi dengan diperolehnya rata-rata persentase partisipasi masyarakat sebanyak 86.57 % yang menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat merupakan suatu kebutuhan dengan didukung keberadaan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan penyangga.

- d. Faktor sosio ekonomi dengan banyaknya jumlah tanggungan memiliki korelasi yang nyata dengan partisipasi pertemuan kelompok serta variabel sosio ekonomi pekerjaan sampingan memiliki korelasi nyata dengan aktifitas yang dilakukan disekitar tempat tinggal dan peranan pemerintah dalam pemeliharaan kawasan penyangga di Kabupaten Gayo Lues.

Dari kesimpulan yang diperoleh maka disarankan beberapa hal diantaranya :

- a. Masyarakat sebagai penghuni yang telah turun temurun menetap pada wilayah konservasi memiliki pemahaman masyarakat yang baik terhadap pengelolaan dan pemanfaatan kawasan penyangga sehingga menjadi acuan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan penyangga.
- b. Disarankan hadirnya kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakat sebagai suatu acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan penyangga untuk peningkatan taraf hidup yang disesuaikan dengan usaha yang telah dilakukan masyarakat pada kawasan penyangga sebagai tempat tinggal .
- c. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih partisipatif yang menunjang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan penyangga sehingga menjadi sarana motivasi masyarakat untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan penyangga dengan bijaksana dan pada akhirnya masyarakat lebih protektif terhadap upaya pelestarian hutan.
- d. Rendahnya sosio ekonomi masyarakat sekitar hutan yang turun menurun pada generasinya sehingga tidak memberikan korelasi yang baik dari aspek sosial ekonomi terhadap partisipasi yang dilakukan pada pengelolaan dan pemanfaatan kawasan penyangga, sehingga menyarankan pemerintah melakukan pengelolaan kawasan penyangga berbasis masyarakat dengan memberikan peluang lapangan kerja yang dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui pola pemanfaatan secara konservasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhiprasetyo. 2006. Pengelolaan Hutan Sistem Masyarakat. Pokok Permasalahan. Jakarta.
- Alikodra , HS. 1976. Dasar-dasar Pengelolaan Kawasan Konservasi. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor

- Awang. 1999. Forest For People Berbasis Ekosistem. Pustaka Hutan Rakyat. Yogyakarta.
- Beckman, Sam. 2004. Mencari Keseimbangan Pengelolaan Interaksi Antara Masyarakat dan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo.FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.Program Acicis.
- BPS.2006. Gayo Lues dalam angka.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues.
- Departemen Kehutanan. 1986. Pola Pengembangan Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Dirjen PPP. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup (2003). Kamus Lingkungan Hidup. Pustaka Digital.
- Manulang, S. 1999. Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi.Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta
- Pamulardi, B. 1994.Undang-undang konservasi Hayati sebagai Dasar Ancaman Pidana Perambah Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat.Majalah Kehutanan Indonesia No. 7 Tahun 1993/1994. Hal 24-27.
- Rosni, R. (2010). PENURUNAN KUALITAS EKOSISTEM MANGROVE HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA. *JURNAL GEOGRAFI*, 1(1), 13-26.
- Slamet, Y. 1992. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Sebelas Maret Universiti Press. Surakarta.
- Soetrisno, L. 1995. Menuju Masyarakat Partisipasi. Penerbit Kanikus.
- Subaktini, D. 2006. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat di Zona Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri.Jember. Jawa Timur. Forum Geografi.Vol 20. No. 1 Juli 2006 : 55 – 56.
- Qutni, D.Ch. 2004.Taman Nasional Gunung Leuser. Mitra Gama Widya. Yogyakarta.Pp.1-55.

